

**LEMBAR JAWABAN
ANALISIS KASUS****Nomor Assessee : 11****Nama Assessee : Mahda Rahmayanti****Tanggal : 04 Oktober 2021****Identifikasi Masalah**

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi aparatur sipil negara saat ini, yang dapat disederhanakan menjadi empat masalah utama yaitu terkait rekrutmen, status pegawai honorer, disiplin pegawai secara umum, dan juga produktifitas ASN yang masih kurang, penulis ingin menelaah satu sebab utama dalam terjadinya berbagai masalah tersebut, yaitu terkait dengan rekrutmen pegawai baru.

Telaahan

Menurut penulis, dengan sistem perekrutan pegawai yang terbuka, disiplin, dan jujur, dapat menghasilkan pegawai yang jujur dan berintegritas. Kejujuran dan integritas merupakan modal utama seorang pegawai negara, baik ASN maupun PPPK.

Dengan rekrutmen yang jujur dan berintegritas, akan memberikan contoh bagi para calon pegawai bagaimana nanti jika sudah bekerja. Sehingga mereka terbiasa berlaku jujur. Tapi pada kenyataannya, rekrutmen masih banyak diwarnai praktek ketidakjujuran, seperti calo jabatan, bahkan pilih kasih untuk memasukkan sanak saudara sendiri dalam perekrutan pegawai padahal orang yang dimasukkan belum tentu berkompeten dan memenuhi syarat, atau sering disebut dengan praktek nepotisme. Praktek korupsi, dan kolusi pun tak jarang ditemui dalam rekrutmen pegawai.

Banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini, namun hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Salah satu contoh upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan kesempatan lelang jabatan bagi jabatan-jabatan eselon, sehingga hanya orang-orang yang memenuhi syarat lah yang bisa menempati jabatan tersebut. Namun, beda halnya dengan rekrutmen pegawai biasa, karena formasi pegawai yang dibutuhkan besar, sulit untuk mengawasi setiap tahap rekrutmennya.

Melihat masalah mendasar tersebut, penulis ingin memberikan saran terkait pemecahan masalah rekrutmen yang ada.

1. Melakukan rekrutmen terdigitalisasi
2. Bekerja sama dengan pengawas eksternal
3. Mensosialisasikan aturan-aturan formal yang berlaku

Rekrutmen yang dilakukan dengan digitalisasi maksudnya adalah untuk mengurangi praktek percaloan maupun nepotisme, semua tahap rekrutmen harus dilakukan secara komputerisasi, baik tes potensi dasarnya, bidangnya, termasuk psikologisnya.

Dengan komputerisasi yang anonim, dan pengawasan secara terpusat dan merata, kemungkinan untuk curang akan semakin kecil. Setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama dalam mengerjakan soal-soal yang ada dengan waktu tertentu. Penggunaan rekrutmen secara terkomputerisasi sudah kerap dilakukan, namun masih banyak kekurangan yang dihadapi pemerintah. Misalnya, gangguan pada server, maupun server yang kerap down, sehingga mengganggu konsentrasi para calon pegawai, dan membuang waktu pengerjaan, yang menyebabkan peserta lain jadwalnya terundur. Oleh karena itu, perlu banyak perbaikan pada sistem yang sudah ada, untuk mencegah terjadinya crash pada jaringan. Setiap waktu dilakukannya rekrutmen, harus ada ahli IT yang siap menganalisis permasalahan terkait jaringan secara cepat dan tepat.

Selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan pengawas eksternal. Contohnya, dalam setiap upaya rekrutmen, semuanya harus diawasi baik oleh pihak KPK, maupun Kepolisian. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan upaya pengawasan dan pengamanan yang ekstra, sehingga semua celah untuk para calon pegawai untuk curang semakin kecil.

Selain kedua upaya tersebut, bagi para calon pegawai perlu dilakukan sosialisasi mengenai berbagai aturan formal dan sanksi yang bisa didapatkan apabila ketahuan berlaku curang. Selain calon pegawai, setiap ASN yang bekerja di bidang rekrutmen tersebut harus tahu seluruh aturan pemerintah yang berlaku terkait rekrutmen pegawai, dan sanksi-sanksi terhadap pelanggarannya, yang bisa berakhir pada pemecatan secara tidak hormat para oknum pejabat atau pegawai yang melanggar tersebut.

Saran penulis untuk penyampaian informasi terkait aturan-aturan formal tersebut harus menarik bahkan kalau bisa interaktif agar setiap calon pegawai maupun pegawai yang mengikuti sosialisasi bisa berperan aktif dan agar materi aturan-aturan tersebut dapat “menempel” dalam waktu yang lama.